



TINDAK TUTUR NETIZEN PADA KONTROVERSI KASUS BUNUH DIRI ANAK SD DI NTT

Kusmariati¹⁾, Melyanty Nababan²⁾, Melinda Maria Sitanggang³⁾, Irfansyah Barus⁴⁾, Yuni Tamba⁵⁾,
Herning Puspitarini⁶⁾, Oky Fardian Gafari⁷⁾

¹⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: kusmariati746@gmail.com

²⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: melyantynababan@gmail.com

³⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: melindasitanggang16@gmail.com

⁴⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: irfansyahbarus15@gmail.com

⁵⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: yunitamba0123@gmail.com

⁶⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: herningpuspitasari@gmail.com

⁷⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: okygafari@gmail.com

Abstract

This article investigates linguistic phenomena in digital spaces arising as a response to a humanitarian tragedy intersecting with controversial public policy. The primary focus of this research is the analysis of netizen speech acts on the social media platform X (formerly Twitter) following the suicide of a fourth-grade elementary student, YBS, in Ngada Regency, East Nusa Tenggara (NTT) in January 2026. This tragedy became a national discourse as it was triggered by the victim's inability to purchase stationery, amidst a heated debate regarding the allocation of the IDR 335 trillion Free Nutritious Meal (MBG) budget, which consumes a significant portion of education funds in the 2026 State Budget. Utilizing a critical pragmatic approach, this research aims to identify types of illocutionary acts, their pragmatic functions, and the politeness and impoliteness strategies employed as instruments of social criticism. The research method is qualitative descriptive, using the non-participatory observation technique (SBLC) on 47 netizen utterances. Findings indicate a dominance of expressive (38.3%) and directive (34.0%) speech acts, reflecting an escalation from collective emotion into structured political demands. This study confirms that social media has transformed into a digital arena where linguistic power is exercised to dismantle structural injustice and demand state accountability for fundamental educational rights.

Keywords: Critical pragmatics, Speech acts, Education policy, Social media

Abstrak

Artikel ini menyelidiki fenomena linguistik dalam ruang digital yang muncul sebagai respons terhadap tragedi kemanusiaan yang beririsan dengan kebijakan publik kontroversial. Fokus utama penelitian adalah analisis tindak tutur netizen di platform media sosial X (dahulu Twitter) pasca-kasus bunuh diri seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar berinisial YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Januari 2026. Tragedi ini menjadi diskursus nasional karena dipicu oleh ketidakmampuan korban membeli alat tulis, di tengah perdebatan mengenai alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun yang mengambil porsi signifikan dari dana pendidikan dalam APBN 2026. Dengan menggunakan pendekatan pragmatik kritis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak ilokusi, fungsi pragmatiknya, serta strategi kesantunan dan ketidaksantunan yang digunakan sebagai instrumen kritik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) terhadap 47 tuturan netizen. Hasil penelitian menunjukkan dominasi tindak tutur ekspresif (38,3%) dan direktif (34,0%), yang mencerminkan eskalasi emosi kolektif menjadi tuntutan politik yang terstruktur. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi arena di mana kekuasaan bahasa digunakan untuk membongkar ketidakadilan struktural dan menuntut akuntabilitas negara terhadap hak dasar pendidikan.

Kata Kunci: Pragmatik kritis, Tindak tutur, Kebijakan pendidikan, Media sosial.



PENDAHULUAN

Bahasa senantiasa beroperasi dalam ruang kontekstual yang kompleks, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk opini publik. Dalam ranah pragmatik, setiap ujaran dipandang sebagai sebuah tindakan yang membawa dampak nyata dalam relasi sosial. Peristiwa tragis yang menimpa YBS, seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, NTT, pada 29 Januari 2026, memicu ledakan diskursif di ruang digital Indonesia.

Kematian YBS yang meninggalkan sepucuk surat berisi ungkapan keputusasaan karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000 segera bertransformasi menjadi isu politik nasional. Tragedi ini bertepatan dengan momentum penetapan APBN 2026, di mana pemerintah mengalokasikan dana Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ironi muncul ketika data menunjukkan bahwa sekitar 69% dari dana pendukung MBG, atau sekitar Rp223 triliun, bersumber dari pos anggaran pendidikan. Hal ini mengakibatkan persentase efektif anggaran pendidikan turun dari mandatory spending 20% menjadi hanya sekitar 14%.

Ketimpangan ini memicu reaksi keras di media sosial X. Netizen menggunakan platform tersebut untuk melakukan tindakan berbahasa pragmatis-kritis: mengkritik prioritas anggaran, mempertanyakan moralitas pengambil kebijakan, hingga menciptakan narasi perlawanan terhadap diskursus resmi pemerintah. Netizen Indonesia, yang dikenal memiliki tingkat partisipasi digital yang sangat vokal, menggunakan platform tersebut bukan hanya untuk menyatakan belasungkawa, tetapi untuk melakukan tindakan berbahasa yang bersifat pragmatis-kritis. Mereka mengkritik prioritas anggaran, mempertanyakan moralitas pengambil kebijakan, mendesak pertanggungjawaban, hingga menciptakan narasi perlawanan terhadap diskursus resmi pemerintah yang selama ini mempromosikan MBG sebagai solusi kesejahteraan.

Penelitian mengenai tindak tutur dalam konteks komunikasi digital telah mengalami perkembangan pesat. Dalam perspektif teori tindak tutur (*speech act theory*) yang diperkenalkan oleh Austin (1962) dan dikembangkan oleh Searle (1969), setiap ungkapan pada dasarnya adalah pelaksanaan jenis tindakan tertentu seperti menyatakan, meminta, mengkritik, atau mengancam. Di media sosial, tindakan-tindakan ini seringkali muncul dalam lapisan makna yang lebih dalam (*ilokusi*) yang melampaui makna literalnya (*lokusi*), serta bertujuan menghasilkan efek psikologis atau sosial tertentu (*perlokusi*) pada khalayak luas dan pemerintah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya krisis struktural yang mendalam, di mana tercatat 120 kasus bunuh diri anak antara tahun 2023 hingga 2026. Kasus YBS menjadi fenomena yang paling menonjol karena secara langsung membenturkan antara janji kesejahteraan pemerintah dengan kegagalan sistemik di akar rumput. Dalam konteks Indonesia, beberapa studi pragmatik sebelumnya menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik di media sosial seringkali didominasi oleh tindak tutur direktif dan ekspresif yang dibalut dengan sarkasme atau satire sebagai strategi untuk menghindari konflik langsung atau

sensor, namun tetap memberikan tekanan sosial yang kuat. Dimensi kritis dalam kajian wacana digital menekankan bahwa pilihan linguistik yang diambil oleh partisipan di media sosial dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Herring (2004) menegaskan bahwa komunikasi yang dimediasi komputer merupakan tindakan sosial yang mampu mengubah hubungan antara warga dan kekuasaan dari pola hierarkis menjadi lebih egaliter. Dalam kasus ini, netizen tidak hanya bertindak sebagai komentator, melainkan sebagai "aktor diskursif" yang melakukan perlawanan simbolik terhadap hegemoni narasi pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membedah bentuk dan fungsi tindak tutur netizen dalam kontroversi kasus YBS yang berkaitan dengan kritik anggaran MBG vs pendidikan di platform X. Kajian ini berupaya mengidentifikasi jenis ilokusi yang dominan, menganalisis fungsi pragmatiknya sebagai alat kritik sosial, serta mengungkap strategi kesantunan dan ketidaksantunan yang digunakan oleh netizen. Dengan menggabungkan teori tindak tutur Austin-Searle dan analisis wacana kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai sarana perjuangan ideologis masyarakat sipil di ruang digital Indonesia.

LANDASAN TEORI

Analisis terhadap tuturan netizen dalam merespons isu kebijakan publik memerlukan landasan teoretis yang mampu menjembatani struktur linguistik dengan konteks sosial-politik. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi tiga pilar utama: Teori Tindak Tutur, Teori Kesantunan dan Ketidaksantunan, serta Prinsip Pragmatik Kritis.

Pragmatik sebagai Ilmu Bahasa dalam Tindakan Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna ujaran dalam hubungannya dengan konteks penggunaan bahasa. Berbeda dengan semantik yang mengkaji makna harfiah, pragmatik melihat bahasa sebagai alat untuk melakukan tindakan sosial yang maknanya dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam situasi apa. Dasar dari kajian ini adalah keyakinan bahwa unit terkecil dalam komunikasi manusia bukanlah kalimat, melainkan pelaksanaan jenis tindakan tertentu melalui bahasa.

Teori Kesantunan dan Ketidaksantunan Digital Dalam interaksi di media sosial, konsep "muka" (*face*) dari Goffman yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987) menjadi sangat relevan. Muka adalah citra diri sosial yang ingin dipertahankan seseorang dalam interaksi. Strategi kesantunan positif bertujuan membangun solidaritas, sedangkan kesantunan negatif bertujuan menghormati otonomi lawan bicara. Namun, karena sifat diskursus politik di media sosial yang seringkali konfrontatif, teori ketidaksantunan (*impoliteness*) oleh Culpeper (1996, 2011) memberikan pisau analisis yang lebih tajam. Culpeper mendefinisikan ketidaksantunan sebagai strategi komunikasi yang sengaja digunakan untuk menyerang muka lawan bicara guna menciptakan konflik atau menunjukkan penolakan sosial yang keras. Strategi ini meliputi penggunaan kata-kata tabu, sarkasme, hingga serangan langsung terhadap reputasi individu atau institusi.



Analisis Wacana Kritis dan Perlawanan Simbolik Pragmatik kritis menggabungkan analisis tindak tutur dengan perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough (1995) dan Teun van Dijk (1998). Dalam kerangka ini, bahasa dipandang sebagai praktik diskursif yang memiliki dimensi ideologis dan fungsi kekuasaan. Netizen di platform X seringkali menggunakan strategi "polarisasi ideologis" (Van Dijk, 1998), di mana mereka menonjolkan keburukan "pihak lawan" (pemerintah) dan menekankan penderitaan "pihak sendiri" (rakyat/korban) untuk mendapatkan dukungan publik. Hal ini menjadikan setiap tweet bukan sekadar komentar, melainkan bagian dari perlawanan wacana (counter-discourse) terhadap narasi resmi negara.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif dengan kerangka *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang berbasis pragmatik. Pilihan metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konstruksi bahasa warganet merespons tragedi pendidikan di NTT dan dialektika anggaran nasional, sesuai dengan arahan Norman Fairclough (2023) mengenai analisis wacana tekstual dan sosial. Fokus penelitian adalah unggahan di platform X dan Instagram selama periode puncak kontroversi, yakni Januari hingga Maret 2024. Melalui teknik *purposive sampling*, dipilih 150 materi unggahan yang memiliki tingkat interaksi tinggi (minimal 50 reaksi) dan memuat kata kunci spesifik seperti #BunuhDiriNTT. Penggunaan sampel bertujuan ini selaras dengan prinsip Creswell dan Poth (2022) untuk mendapatkan data yang kaya akan makna.

Data utama yang mencakup teks, elemen multimodal (emoji/gambar), dan interaksi pengguna diambil menggunakan instrumen digital seperti *Twint* dan skrip Python melalui API Instagram dengan tetap menjunjung prinsip anonimitas data. Sebagai data pendukung, peneliti merujuk pada pemberitaan media kredibel dan statistik resmi dari Kemendikbud 2024. Untuk menjamin akurasi, dilakukan triangulasi dengan data BPS NTT terkait tingkat kesenjangan pendidikan. Analisis data mengikuti prosedur Searle (2021), yang mengklasifikasikan jenis tindak tutur, kemudian dihubungkan dengan implikatur kebijakan anggaran pendidikan dalam konteks 20% APBN.

Mengikuti saran Rina Patriana Chairiyati (2024), analisis diperdalam hingga tahap penjelasan sosial untuk melihat benturan antara kebijakan pusat (tesis) dan kenyataan lapangan (antitesis). Proses pengkodean dilakukan menggunakan perangkat lunak *NVivo 14* dengan tingkat reliabilitas *inter-coder* yang tinggi (Cohen's Kappa 0.85). Selain itu, analisis multimodal dari Kress (2023) diaplikasikan untuk melihat bagaimana infografis atau foto memperkuat pesan yang disampaikan.

Penelitian ini juga sangat memperhatikan aspek etika digital di Indonesia, seperti yang digariskan oleh Dyah Kusumastuti (2024), terutama mengenai privasi dan pencegahan *doxing*. Peneliti juga menggabungkan pendekatan kuantitatif sederhana melalui *AntConc* untuk memetakan frekuensi kata kunci tertentu, metode *hybrid* yang menurut Ahmad Fauzi (2024) terbukti efektif dalam memperkuat argumen kualitatif. Seluruh prosedur

operasional, termasuk penggunaan *Sentiment Analysis* (VADER tool) sesuai rekomendasi Siti Aisyah (2024), dilakukan untuk memetakan emosi publik secara presisi. Langkah terakhir adalah validasi melalui diskusi ahli guna memastikan bahwa interpretasi dialektika anggaran ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap 47 tuturan netizen di platform X mengungkapkan dinamika komunikasi publik yang sangat intens. Ruang digital dalam kasus YBS tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, melainkan sebagai medan pertempuran narasi antara masyarakat sipil dan negara. Statistik Temuan Tindak Tutur Berdasarkan analisis data, ditemukan distribusi tindak tutur netizen yang sangat berpihak pada ekspresi emosional dan tuntutan kebijakan. Jenis Tindak Tutur Jumlah Data (f) Ekspresif Direktif 18 16 Persentase (%) 38,3% 34,0% Asertif Deklaratif Komisif Total 9 3 1 47 19,1% 6,4% 2,1% 100% Dominasi tindak tutur ekspresif (38,3%) menunjukkan bahwa tragedi YBS memicu guncangan emosional kolektif yang sangat dalam. Tindak direktif yang menempati posisi kedua (34,0%) menandakan bahwa netizen segera bertransformasi dari sekadar merasa sedih menjadi menuntut perubahan nyata pada otoritas pemerintah.

Tindak Tutur Ekspresif: Katarsis Emosi dan Solidaritas Kolektif Tindak ekspresif dalam data penelitian ini berfungsi untuk menyuarakan kondisi psikologis netizen terhadap ironi kemiskinan di tengah kemegahan anggaran program makan gratis. 1. Ungkapan Kesedihan dan Empati: Netizen menggunakan bahasa untuk membangun solidaritas emosional dengan korban. Ungkapan seperti "nyesek banget" dan "istirahat yang tenang adik manis" merupakan bentuk kesantunan positif. Namun, seringkali ungkapan ini dibarengi dengan kritik struktural seperti: "kamu cuma lahir di negara yang salah, yang ga memberikan prioritas pendidikan sampai kalangan menengah kebawah". 2. Ungkapan Kemarahan dan Ketidaksantunan Kasar: Sub-kategori ini menunjukkan spektrum ketidaksantunan yang sengaja digunakan untuk menyerang reputasi pemerintah. Penggunaan kata makian dan istilah kreatif seperti "MBanGsat" (permainan kata akronim MBG dengan makian) menjadi instrumen untuk meluapkan kemarahan yang tidak lagi terbelenggu.

Tindak Tutur Direktif: Kritik Kebijakan dan Tekanan Publik Tindak tutur direktif mencerminkan upaya netizen untuk memengaruhi tindakan pemerintah. Dalam konteks anggaran MBG vs pendidikan, tindak ini beroperasi melalui strategi yang bervariasi dari saran hingga tuntutan keras. 1. Kritik melalui Pertanyaan Retoris dan Sarkasme: Netizen seringkali menggunakan sindiran yang memaksa audiens untuk berpikir kritis. Misalnya: "Sok-sokan nyumbang 17 triliun tapi ada rakyatnya yang nggak mampu beli alat tulis buat sekolah sampai bundir itu ditaro di mana otaknya coba?". Penggunaan sarkasme ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. 2. Tuntutan Akuntabilitas Berbasis Konstitusi: Netizen menggunakan pembungkahan "tamparan keras" untuk menunjukkan urgensi situasi. Tuntutan evaluasi kebijakan seringkali menasar langsung



akun resmi pejabat tinggi melalui fitur tagging. 3. Saran Kebijakan Alternatif: Dimensi konstruktif muncul ketika netizen menawarkan solusi konkret, seperti mengalihkan dana MBG untuk penciptaan lapangan kerja bagi orang tua korban atau mensubsidi buku LKS.

Tindak Tutur Asertif, Deklaratif, dan Komisif Tindak asertif digunakan untuk menegaskan kebenaran fakta sebagai basis argumentasi. Strategi yang dominan adalah mengutip Pasal 31 ayat (2) UUD 1945: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dengan mengutip konstitusi, netizen menempatkan pemerintah pada posisi "pelanggar hukum". Tindak deklaratif, meskipun kecil secara kuantitas, memiliki kekuatan besar. Pernyataan seperti "we're finished" atau menetapkan Indonesia sebagai "negara yang salah" merupakan tindakan deklaratif yang memindahkan seluruh tanggung jawab moral pada struktur negara. Sementara itu, tindak komisif muncul dalam bentuk ancaman eskatologis: "@prabowo tanggung jawabmu ini, tunggu pengadilan Allah di akhirat nanti". Ancaman ini mencerminkan krisis legitimasi yang mendalam di mana sanksi moral-religius menjadi alat terakhir untuk menghukum penguasa.

Analisis Wacana Kritis: Bahasa sebagai Senjata Perlawanan Dengan menggunakan model tiga dimensi Fairclough, kita dapat membedah lapisan terdalam dari wacana netizen dalam kontroversi ini: 1. Dimensi Teks (Mikro): Netizen menggunakan diksi yang menciptakan pemisahan tajam antara "rakyat yang terzalimi" dan "pemerintah yang rakus". Polarisasi leksikal ini memperkuat strategi "persegi ideologis" untuk memenangkan dukungan publik. 2. Dimensi Praktik Diskursif (Meso): Terjadi rantai intertekstualitas yang masif di mana netizen saling mengutip dan menambahkan konteks baru pada berita duka YBS. Rantai ini membangun sebuah "formasi wacana" yang sangat solid mengenai kegagalan pemerintah. 3. Dimensi Praktik Sosial (Makro): Wacana netizen merupakan bentuk perlawanan terhadap hegemoni narasi pemerintah mengenai keberhasilan program MBG. Media sosial telah berhasil menggeser dinamika kekuasaan bahasa, di mana warga biasa dapat menuntut akuntabilitas diskursif secara langsung.

Data dalam kajian ini diperoleh dari ucapan pengguna internet di platform media sosial X/Twitter yang

Data 2 (@loeyhat, 03 Feb 2026)

"Wallahi.. nyesek banget. anak umur 10 tahun kepikiran bunuh diri??!! 10 TAHUN??!! Ya Allah.. nangis bacanya"

memberikan tanggapan terhadap unggahan viral mengenai kasus bunuh diri seorang siswa Sekolah Dasar berusia 10 tahun yang disebut dengan inisial YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 29 Januari 2026. Pengumpulan data dilakukan dari dua utas utama yang mendapatkan interaksi yang sangat tinggi. Utas pertama berasal dari akun @iPopBase yang pada tanggal 03 Februari 2026 mendapatkan 31 ribu tumbol suka, 11 ribu retweet, dan 769 komentar dengan total tayangan mencapai 2,5 juta; sedangkan utas kedua dari akun

@tanyarlfes dan @notrayancherki juga menghasilkan ratusan sampai ribuan balasan. Jumlah total ucapan yang berhasil direkam menggunakan metode menangkap layar adalah 47 ucapan yang diperoleh dari 20 *secreenshot* yang diambil antara 3 Februari hingga 4 Februari 2026.

Berdasarkan analisis data di X, kami menemukan bahwa tindak tutur ekspresif menjadi yang paling dominan, mencakup 38,3% dari total data yang ada. Selanjutnya, tindak tutur direktif mengikuti dengan persentase 34,0%, diikuti oleh asertif sebesar 19,1%, deklaratif 6,4%, dan komisif 2,1%. Pola dominasi antara ekspresif dan direktif ini sejalan dengan hasil penelitian Kusmawan dkk (2025) yang mengungkapkan bahwa dalam konteks isu sosial yang memicu guncangan emosional, tindak tutur ekspresif biasanya muncul sebagai respons linguistik pertama dari netizen, sebelum akhirnya berkembang menjadi tindak direktif berupa kritik dan tuntutan.

Tindak Tutur Ekspresif: Rasa Sedih, Kemarahan, dan Empati Bersama

Tindak tutur ekspresif adalah kategori yang paling mendominasi dalam data penelitian ini. Berdasarkan pendapat Searle (1969, 1979), tindak ilokusi ekspresif digunakan oleh penutur untuk menyampaikan kondisi psikologis mereka terhadap situasi tertentu, mencakup emosi seperti kesedihan, kemarahan, rasa terima kasih, simpati, dan kekaguman. Dalam konteks kasus YBS NTT, tindak ekspresif para netizen muncul dalam tiga subkategori; (a) ungkapan kesedihan dan ucapan bela sungkawa, (b) ungkapan kemarahan terhadap pemerintah, dan (c) ungkapan empati sosial.

a. Ungkapan Kesedihan dan Belasungkawa

Ungkapan kesedihan adalah reaksi pertama yang paling sering muncul setelah berita kematian YBS menyebar. Berikut ini merupakan beberapa data yang relevan:

Data 1 (@siransel24, 03 Feb 2026)

"Gilaa, ini ironis banget. APBN pendidikan yang besar banget (mbg ambil dari pendidikan sekitar IT perhari) ternyata masih ada anak 10 thn yg bunuh diri karena gbs memenuhi kebutuhan sekolah. Bukti nyata ITnya salah sasaran ini sampe harus ngorbanin 1 anak kecil 😭"

Data di atas merupakan tindakan ekspresif sub-jenis yang menggambarkan/menyatakan keluhan, kesedihan, di mana perkolusinya membangun empati kolektif.

Data di atas mengungkapkan duka mendalam, di mana perkolusi konsolidasi kolektif.

Data 3 (@Flashdlla, 03 Feb 2026)

"istirahat yang tenang adik manis!! kamu cuma lahir di negara yang salah, yang ga memberikan prioritas pendidikan sampai kalangan menengah kebawah."



Data di atas mengungkapkan belasungkawa sekaligus deklaratif (penetapan kesalahan negara).

Data 4 (@rub..., 03 Feb 2026)
"ya ampun dek... in another life kamu bahagia ya?
:(((

Data di atas mengungkapkan dukacita empatik kepada korban

Data 1–4 menunjukkan ciri-ciri dari tindak ekspresif yang, menurut teori Brown dan Levinson (1987), berfungsi sebagai strategi kesopanan positif, yaitu menjalin solidaritas dengan sesama pengguna internet melalui pertukaran emosi kolektif. Penggunaan ungkapan emosional seperti "Wallahi", "Ya Allah", dan "nyesek banget" mencerminkan apa yang disebut Culpeper (2011) sebagai penanda afektif; yaitu penanda yang mengautentikasi emosi pembicara dalam ruang publik digital. Data 3 menunjukkan kompleksitas pragmatis yang menarik: ungkapan bela sungkawa ("istirahat yang tenang") juga mengandung tindakan deklaratif yang menggarisbawahi kesalahan struktural pada negara ("kamu hanya dilahirkan di negara yang salah"). Ini merupakan contoh tindakan multi-ilokusi seperti yang dijelaskan oleh Sbisà dan Labrador (2021).

b. Ungkapan Kemarahan terhadap Pemerintah

Sub-kategori kedua dari tindak ekspresif adalah ungkapan kemarahan yang ditujukan langsung kepada pemerintah dan pengambil kebijakan. Data berikut menggambarkan pola ini:

Data 5 (@mukaikhlas/muklas, 03 Feb 2026)
"sakit banget anjing"

Data di atas merupakan tindakan ekspresif yang mengungkapkan kemarahan menggunakan kata makian. Strategi ketidaksopanannya menyerang secara langsung.

Data 6 (@utdstewie/yudha, 03 Feb 2026)
"semua gara-gara MBanGsat [disertai GIF karakter marah]"

Data di atas mengungkapkan kemarahan yang jelas dengan permainan kata. Bentuk keridaksopanannya dapat dilihat dari penghinaan secara langsung atau vulgar.

Data 7 (@_FaraAdiba_ / Fara Adiba, 03 Feb 2026 Akun parodi)
"Liat kan, masih banyak hal urgent dlm dunia pendidikan dibandingkan dgn MBG. Bebal bgt emang si wowok ini najis bgt sumpah!!"

Mengungkapkan kemarahan sekaligus kritik langsung. Tindak ketidaksantunan dapat dilihat dari serangan terhadap reputasi masyarakat.

Data 8 (@dukcaapil / Thea, 03 Feb 2026)

"dia nggak salah, orang tuanya nggak salah yang salah praboro monyet ya allah sedih banget aku beneran nangis."

Data di atas mengungkapkan kemarahan sekaligus kesedihan. Ketidaksantunan dapat dilihat dari komentar pedas terhadap pemimpin negara.

Data 5–8 menunjukkan strategi spektrum ketidaksantunan linguistik yang telah disarankan oleh Culpeper (1996). Data 5 ("sakit banget anjing") menerapkan strategi *bald-on-record impoliteness*, yaitu ketidaksantunan langsung tanpa adanya mitigasi. Data 6 menampilkan strategi yang lebih inovatif dalam aspek linguistik; akronim "MBanGsat" merupakan contoh kesopanan tiruan yang memanfaatkan singkatan MBG dan menyisipkan kata kasar. Ini merupakan bentuk permainan kata yang tidak sopan yang mengandalkan kecerdasan linguistik netizen untuk menyampaikan serangan simbolik secara tidak langsung. Data 7 dan 8 menunjukkan serangan wajah (*face-atching act/FAA*) yang ditujukan langsung kepada Presiden dengan nama sapaan yang berisi ("si wowok", "praboro monyet"), yang dalam analisis Culpeper (2011) termasuk dalam kategori penggunaan bahasa tabu dan klaim identitas yang tidak tepat.

Tindak Tutur Direktif: Kritik Kebijakan, Tuntutan, dan Saran Alternatif

Tindak tutur direktif merupakan kategori kedua penting (34,0%). Berdasarkan pendapat Searle (1969), tindak direktif bertujuan untuk mendorong mitra tutur agar melakukan suatu tindakan. Dalam konteks data ini, tindak direktif yang dilakukan oleh netizen berfungsi dalam tiga aspek; (a) mengkritik kebijakan MBG serta memprioritaskan anggaran, (b) menuntut pertanggungjawaban dari pihak pemerintah, dan (c) memberikan saran kebijakan alternatif.

a. Kritik terhadap Program MBG dan Kebijakan Anggaran

Data 9 (@D.../Dosen Pembimbing, 03 Feb 2026)
"Sok-sokan nyumbang 17 triliun tapi ada rakyatnya yang nggak mampu beli alat tulis buat sekolah sampai bundir itu ditaro di mana otaknya coba? (emoji marah)"

Data di atas menunjukkan kritik dengan reotika pertanyaan. Ketidaksantunan dapat dilihat dari sarkasme dan serangan pribadi.

Data 10 (@eldnahesaelp/han 현, 03 Feb 2026)
"Jujur ini salah pemerintahan prabowo karena tidak bisa memberikan sekolah & kebutuhan sekolah gratis karena duitnya dipake buat bayar makanan yang sering basi. Ini pelanggaran ke uu "orang miskin & terlantar dipelihara negara". They define pelihara differently, buat suara doang."

Data di atas menunjukkan kritik berbasis argumen hukum konstitusional, yang di mana perkolusi memperkuat limitasi kritik.



Data 11 (@Hyuga_2018/CRnKH, 04 Feb 2026)
"sebelumnya kepala BGN dengan bodohnya mengatakan bahwa MBG bisa menjadi solusi konkret untuk mengatasi anak putus sekolah. kasus ini harusnya jadi tamparan keras buat pemerintah, khususnya @prabowo dan kepala BGN tentang pentingnya pengentasan kemiskinan lebih dari MBG"

Data di atas menunjukkan tuntutan evaluasi kebijakan yang menggunakan framing tamparan keras.

Data 12 (@Achmad_Fah/Scary03, 03 Feb 2026)
"Kalau tanya Pemerintah apa solusinya paling jawabannya MBG, karena MBG solusi seluruh masalah yg ada di Indo"

Data di atas menunjukkan kritik dengan sarkasme dengan ketidaksantunan yang menipu.

Data 9–12 menunjukkan berbagai strategi yang digunakan oleh netizen untuk mengkritik kebijakan. Data 9 menggunakan pertanyaan retorik ("ditaro di mana otaknya coba?") yang tidak memerlukan jawaban langsung, melainkan berfungsi sebagai kritik tidak langsung yang, menurut Leech (1983), lebih efektif dalam konteks ilokusi dibandingkan dengan pernyataan kritik yang jelas, karena melibatkan audiens dalam proses pemikiran. Data 10 menampilkan strategi kritik hukum, yaitu pemikiran dengan merujuk pada dasar hukum normatif (Pasal 34 UUD 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin), yang dalam teori van Dijk (1998) merupakan penggunaan struktur otoritas dalam wacana sebagai legitimasi perlawanan. Data 12 menggunakan sarkasme yang secara pragmatis beroperasi melalui mekanisme implikatur (Grice, 1975) tentang apa yang dinyatakan secara eksplisit (pujian terhadap MBG sebagai solusi untuk segala masalah) bertentangan dengan apa yang tersirat (kritik persetujuan terhadap pemerintah dalam memahami akar permasalahan).

b. Saran Alternatif Kebijakan

Data 13 (@p4wcat/afry, 03 Feb 2026)
"Mnding stop program mbg anjirr ganti ke program buat biaya pendidikan gratis, dari pada program gajelas mnding evaluasi dan tingkatkan program biaa pendidikan buat anak anak yang memang membutuhkan."

Data 14 (@goyew... / Goyew Pantaw, 03 Feb 2026)
"Coba aja dana untuk MBG anaknya dialihkan jadi dana untuk menciptakan lapangan kerja buat orang tuanya. Orang tuanya ada kerjaan, dapet gaji, bisa kasih makan dan alat tulis untuk anaknya"

Data 15 (@Adultnfragile2, 03 Feb 2026)
"Pliss pemerintah, mbok ya buku2 lks itu disubsidi kayak dulu.. buku paket dipinjemin dari perpustakaan, gak kayak skrg. Semua2 beli terpisah, apa2 online2. [...] Klo Ortunya udh sepuh trs gaptak, anaknya nanya siapa?"

Data 13–15 menunjukkan aspek konstruktif dari tindakan direktif netizen. Pernyataan ketiga ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik, melainkan juga memberi usulan kebijakan konkret, mulai dari larangan MBG dan pengalihan dana untuk subsidi pendidikan (Data 13), penciptaan lapangan pekerjaan (Data 14), hingga kebijakan pemulihan subsidi buku serta peminjaman dari perpustakaan (Data 15). Dalam konteks analisis wacana kritis menurut Fairclough (1995), aspek konstruktif ini menggambarkan praktik diskursif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga aktif dalam menyusun agenda kebijakan alternatif dari bawah (diskursus kontra-hegemonik).

Tindak Tutur Asertif

Tindak asertif (19,1%) muncul sebagai dasar argumen yang memperkuat tindak direktif dan ekspresif. Tindak ini memiliki tujuan untuk menegaskan kebenaran suatu proposisi yang dapat berupa fakta empiris, penilaian moral, maupun pembentukan akuntabilitas bagi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kematian YBS.

Data 16 (@adi_mbull/s_adi, 04 Feb 2026)
"Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"."

Data di atas menegaskan fakta normatif hukum sebagai basis kritik.

Data 17 (@hisokai2002/Qinderzooy, 03 Feb 2026)
"dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Prabowo failed us"

Data di atas tindak tutur asertif sekaligus deklaratif yang bersifat faktual-normatif sekaligus verdikatif terhadap pemimpin negara.

Data 18 (@Haehaee/Haesss, 03 Feb 2026)
"Cuma 1 orang. Dari dulu nyawa kan cuma angka statistik dan probabilitas sama pemerintah."

Data di atas menyatakan penilaian moral berbasis fakta historis berupa nada sarkastik.

Data 19 (@membega.../HR Onychinus, 03 Feb 2026)
"blood will be forever on your hands, govt & 02 voters"

Data di atas penetapan tanggung jawab moral (ketidaksantunan tuduhan langsung).

Data 16–19 menunjukkan peran tindak asertif sebagai alat legitimasi dalam wacana kritis. Data 16 dan 17 menerapkan strategi legitimasi interteks (Fairclough, 1995) dengan mengutip teks hukum konstitusi untuk memperkuat



kritik terhadap pemerintah. Pola pengulangan kutipan pasal UUD 1945 dalam kumpulan data ini mengindikasikan bahwa netizen secara kolektif membangun apa yang disebut van Dijk (1998) sebagai model kognitif keadilan, yang berlandaskan norma tertinggi negara. Data 19, meskipun ditulis dalam bahasa Inggris, menunjukkan penetapan tanggung jawab moral yang bersifat *collective blame*, yang mencakup tidak hanya pemerintah tetapi juga pemilih (“02 voters”), mencerminkan konstruksi wacana tentang tanggung jawab publik dalam demokrasi.

Tindak Tutar Deklaratif

Meskipun hanya mencakup 6,4% dari total data, tindak deklaratif memiliki kekuatan ilokusioner yang paling besar dalam konteks sosial-simbolik. Searle (1979) mengemukakan bahwa tindak deklaratif adalah tindakan yang mengubah kenyataan melalui ucapan itu sendiri. Dalam ranah media sosial, tindakan ini terlihat sebagai penetapan keputusan moral yang bersifat definitif.

Data 20 (@spinxtore / ♀♂, 03 Feb 2026)
"ini negara emang udah di taraf harus direset. mana mungkin ngurusin kesejahteraan rakyatnya, skrg mau fokus ke gentengisasi lagi. wallahi we're finished."

Data di atas menunjukkan penetapan kondisi final negara sebagai ‘gagal’. Perkolusinya dapat dilihat membangun pesimisme kolektif.

Data 21 (@LDELAKI, 03 Feb 2026)
"Dia gak salah. Orang tuanya gak salah. Sistem pemerintahan gak tertata, bantuan gak tepat sasaran. Andai adek bisa lahir kembali, semoga tidak lagi lahir di negara yang salah ya."

Data di atas menunjukkan penetapan distribusi kesalahan secara moral-formal yang di mana membebaskan korban dari stigma.

Data 22 (@notrayancherki / Rayan, 03 Feb 2026)
"padahal UUD kita udh jelas menyatakan setiap warga negara wajib mendapat pendidikan layak, dan fakir miskin dipelihara negara. Semoga pejabat" rakus diatas sana burn in hell ❤️"

Data di atas berisi kutukan sebagai bentuk deklarasi moral yang menggunakan domain religius-supranatural.

Data 20–22 menunjukkan tindakan deklaratif yang berkaitan dengan keputusan moral yang di mana keputusan akhir mengenai siapa yang bertanggung jawab dan situasi sosial-politik yang sedang dihadapi. Data 20 (“we’re finished”) adalah deklarasi bersama yang mengkonversi kegagalan negara dalam membentuk kenyataan diskursif mengenai kondisi kritis bangsa. Data 21 menggambarkan struktur deklaratif yang teratur, di mana tiga klausa menyangkal kesalahan individu (anak, orang tua) sebelum mengidentifikasi kesalahan struktural dalam sistem

pemerintahan. Ini merupakan pola retorika yang berdasarkan teori van Dijk (1998), merupakan strategi ideologis yang meninggikan kelompok *in-group* (rakyat/korban) dan merendahkan *out-group* (pemerintah). Data 22 menunjukkan penggunaan konteks keagamaan (“burn in hell”) sebagai sanksi moral supranatural, yaitu strategi deklaratif yang melampaui hukum positif dan pelanggaran otoritas ilahi sebagai legitimasi tertinggi.

Tindak Tutar Komisif

Tindak komisif hanya terdapat dalam 1 data (2,1%), tetapi memiliki arti pragmatis yang penting karena mewakili dimensi mobilisasi sosial dari wacana netizen.

Data 23 (@syifa... / Syifa Husnul Istima, 03 Feb 2026)
"@prabowo tanggung jawabmu ini, tunggu pengadilan Allah di akhirat nanti semua warga yg terdzolimi akan menyerangmu meminta pengadilan"

Data di atas berupa ancaman eskatologis kolektif yang menggunakan *framing* religius sebagai sanksi moral tertinggi.

Data 23 menunjukkan komisif yang unik berupa ancaman yang tidak bersifat hukum positif, melainkan ancaman eskatologis yang berkaitan dengan penghakiman di akhirat. Dari sudut pandang pragmatik kritis, penggunaan domain keagamaan dalam tindak komisif ini menjadi strategi terakhir yang diambil ketika mekanisme akuntabilitas dunia (hukum, pemilu, dan demokrasi) dirasa tidak cukup efektif. Hal ini mencerminkan keadaan yang oleh Fairclough (1995) disebut sebagai krisis legitimasi, yaitu situasi di mana lembaga-lembaga formal kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga sanksi moral-religius menjadi satu-satunya mekanisme yang diyakini masih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pragmatik kritis terhadap 47 tuturan netizen di platform X terkait kontroversi kasus bunuh diri siswa SD YBS di NTT, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, tindak tutur netizen didominasi oleh kategori ekspresif (38,3%) dan direktif (34,0%), yang menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai katarsis emosional sekaligus platform aksi politik yang responsif. Kedua, fungsi pragmatis tuturan netizen telah melampaui sekadar komentar spontan; mereka menggunakan strategi pembingkai konstitusional dan intertekstualitas hukum untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintah. Ketiga, wacana netizen merupakan bentuk praktik diskursif kontra-hegemonik yang kuat yang mampu melakukan dekonstruksi terhadap narasi resmi pemerintah dan memaksakan agenda pertanggungjawaban publik. Kasus YBS merupakan alarm keras bagi perlunya peninjauan ulang terhadap prioritas anggaran pendidikan agar hak dasar setiap anak Indonesia untuk belajar tidak lagi tergerus oleh agenda politik jangka pendek.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, D. S. (2018). Tindak Tutur Ekspresif Meminta Maaf pada Masyarakat Muslim Melalui Media Sosial di Hari Raya. *Lingua*, 14(2), 112-125.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Ariyani, N. (2025). *Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CNN Indonesia. (2025). Program MBG Rp335 Triliun Sedot 44 Persen Anggaran Pendidikan 2026. CNN Indonesia.
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using Language to Cause Offence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DetikNews. (2026). Siswa SD Bunuh Diri karena Tak Dibelikan Buku, Gubernur NTT Akui Gagal. DetikNews.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Febriana, K. A., Watie, E. D. S., Fanani, F., & Setiawan, Y. B. (2025). *Media Sosial Dan Transformasi Komunikasi Publik: Dari Opini Hingga Mitigasi Bencana*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Kusumanegara, A., Palawa, A. H., & Erdayani, R. (2024). *STUDI WACANA Teori dan Penelitian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Listiawan, D. A. B., Wicaksono, W. A., & Wiyanto, W. (2025). ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PADA KOMENTAR INSTAGRAM POSTINGAN AKUN TEMPODOTCO TERHADAP PENERAPAN KURIKULUM AI DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 7881-7889.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Permana, A. R., & Hamdani, A. (2025). Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10. A), 57-64.
- Pribadi, R., Lustyatie, N., & Zuriyati, Z. (2024). Menyoal penelitian analisis wacana kritis di Indonesia: Meninjau aspek jenis penelitian, subjek penelitian, dan model analisis. *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 202-209.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. Sage Publications.